

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Ermiyati Sulistyoratih

estratih@gmail.com

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of human resources capacity, information technology utilization and financial supervision on the reliability of local government financial report. While, the population was Local Government Organization, East Java Province. The research was causal-comparative with quantitative approach. Moreover, the instrument used survey. Furthermore, the data were primary with questionnaire as the instrument. In addition, the data collection technique used purposive sampling. In line with, there were 78 respondents as sample. Meanwhile, the data analysis technique used multiple linear regression. The research result concluded the human resources capacity had positive and significant effect on the reliability of local government financial report. It meant the more adequate the capacity of human resources, the more reliable of local government financial report would be. The information technology utilization had positive and significant effect on the reliability of local government financial report, this shown as the better used of information technology, the more reliable of local government financial report would be. Furthermore, the financial supervision had positive and significant effect on the reliability of local government financial report, this shown as the higher financial supervision, the more reliable of local government financial report would be.

Keywords: Human resource capacity, information technology utilization, financial supervision, reliability of local government financial report.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif (*causal-comparative research*) dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei. Data yang digunakan adalah data primer melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 78 responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah, hal ini menunjukkan semakin memadai kapasitas sumber daya manusia maka semakin andal pelaporan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah, hal ini menunjukkan semakin baik penggunaan teknologi informasi maka semakin andal pelaporan keuangan daerah. Pengawasan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah, hal ini menunjukkan semakin tingginya pengawasan keuangan maka semakin andal pelaporan keuangan daerah.

Kata Kunci: Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan, keterandalan pelaporan keuangan daerah.

PENDAHULUAN

Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan merupakan elemen penting dari penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik. Dewasa ini, masih banyak fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih terdapat penyimpangan-penyimpangan. Sehingga, mendorong meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa kriteria kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan terdiri dari: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami. Mengingat keterandalan merupakan salah satu unsur informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, pemerintah daerah dituntut untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan daerah agar informasi yang diperoleh andal. Keterandalan pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid.

Hal pertama yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah kualitas sumber daya manusia. Dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai, menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan serta sumber daya yang menghasilkannya. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang andal dan dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2014) menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas dituntut untuk memiliki kemampuan atau keahlian akuntansi yang memadai yang dapat dicapai dengan adanya kemauan untuk belajar dan mengasah kemampuannya dibidang akuntansi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memiliki pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Namun pada kenyataannya pegawai pemerintah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi masih terbatas dan mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal kedua yang mungkin mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Teknologi merupakan alat yang digunakan individual dalam penyelesaian tugas mereka, dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak, data) dan penggunaan jasa pendukung (*training*) yang memberikan panduan penggunaan dalam menyelesaikan tugas.

Seperti yang kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Uraian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan maupun Roshanti *et al.*, (2014) yang menunjukkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang telah diuraikan diatas, penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2014) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Maka dari itu penelitian ini diperlukan untuk membuktikan apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Faktor ketiga yang mempengaruhi keterandalan pelaporan

keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Pengawasan keuangan daerah merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?; (2) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah; (3) Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirangkum sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah; (2) Untuk menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah; (3) Untuk menguji secara empiris pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) kontribusi praktis yaitu, bagi peneliti sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu yang sedang diteliti khususnya mengenai kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi untuk pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah dan pengawasan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, serta dijadikan bahan masukan dan saran-saran bagi pihak organisasi yang terkait untuk dapat mengevaluasi dan menggunakan hasil penelitian ini untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) kontribusi teoretis yaitu, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian untuk perkembangan instansi pemerintah di sektor publik khususnya tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Serta dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi maupun acuan bagi mahasiswa maupun pembaca untuk melakukan penelitian di waktu yang akan datang.

TINJAUAN TEORITIS

Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori keagenan (*Agency Theory*) mengacu pada pemenuhan tujuan utama dari manajemen keuangan yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer. Pembuatan keputusan oleh manajer perusahaan (*agent*) harus bisa diterima sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan segala konsekuensinya. Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan disebut *principal*. Dalam teori keagenan (*Agency Theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*Agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak baik eksplisit maupun implisit dengan pihak lain yaitu *agent* dengan bertindak sesuai dengan yang diinginkan oleh *principal*.

akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Hubungan antara *principal* dan *agent* dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*Asymmetrical Information*)

karena agent berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan principal. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal. Dalam kondisi tersebut agent dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Keterandalan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah struktur dan proses meliputi segala aspek yang berkaitan dengan bagaimana penyediaan, pelaporan dan penyampaian informasi keuangan suatu pemerintahan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan yang akan membantu pencapaian tujuan ekonomik dan sosial. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan suatu daerah dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

PP No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menyebutkan bahwa keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Dalam kasus ini pengguna informasi tersebut bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang disajikan.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan yang meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai dari manusia untuk menyelesaikan tugas ataupun tanggungjawab yang diberikan kepadanya. menilai kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan.

Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah melalui jaringan sistem informasi *on-line* antar instansi pemerintah daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance*). Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya: (1) Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; (2) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini. Dalam pemerintahan kita saat ini telah menggunakan Teknologi Informasi sebagai salah satu media penyebaran informasi kepada masyarakat luas. Namun dalam beberapa hal sering kita temui penyebaran informasi secara *online* tersebut sering mengalami beberapa masalah.

Pengawasan Keuangan

Pengawasan keuangan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Menurut Bohari (1992:25) pengawasan dapat dibedakan berdasarkan sifat, teknik dan segi hubungannya antara pemeriksa dengan yang diperiksa: (1) pengawasan berdasarkan sifatnya yaitu, pengawasan preventif dan pengawasan represif; (2) pengawasan berdasarkan tekniknya yaitu, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung ; (3) pengawasan berdasarkan segi hubungan antara pemeriksa dengan yang diperiksa yaitu, pengawasan intern dan pengawasan ekstern

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Kualitas sumber daya manusia ialah kemampuan yang meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai dari manusia untuk menyelesaikan tugas ataupun tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk.

Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keterandalan. Beberapa penelitian sebelumnya telah menguji pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kesuma, *et al.*, (2013) menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Adanya teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multiprocessing*. Menurut (Jogiyanto, 1995 dalam Harifan 2009) menjelaskan bahwa informasi yang

berkualitas dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Salah satu dari komponen teknologi informasi adalah komputer yang merupakan bagian terpenting dari teknologi informasi yang akan sangat membantu peningkatan kualitas dari informasi.

Perubahan dalam pola penyusunan laporan keuangan daerah yang awalnya secara manual dilihat tidak efektif, efisien dan untuk nilai keandalan suatu laporan keuangan masih kurang keakuratannya karena penyusunan laporan keuangan secara manual lebih besar resiko terjadi kesalahan, oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan daerah sangatlah dibutuhkan. Berdasarkan pengertian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan Roshanti *et al.*, (2014) dengan hasil menunjukkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah

Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

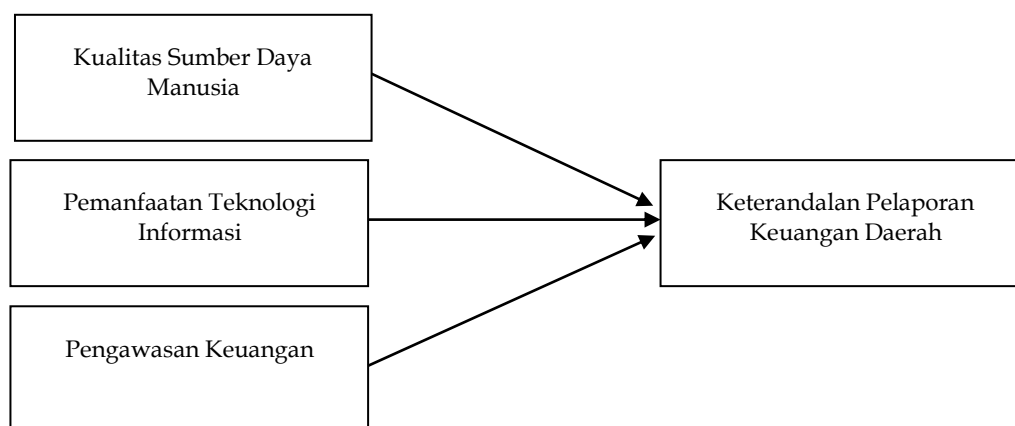
Pengawasan keuangan daerah dapat membantu pemerintah dalam mengontrol kegiatan-kegiatan SKPD dalam menggunakan anggaran dan menyusun laporan keuangan. Pengawasan keuangan ini sangat penting apalagi dalam lingkup pemerintahan, agar tidak terjadi hal-hal atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum pemerintahan itu sendiri. Kurangnya pengawasan yang dilakukan akan menyebabkan kelalaian dalam pembuatan pelaporan keuangan daerah, sehingga kurang tertibnya oenyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi belum optimalnya kegiatan identifikasi risikom dan analisis risiko.

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Anggraeni (2014) yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Di Kabupaten Sidoarjo) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas diduga terdapat hubungan yang signifikan antara pengawasan keuangan daerah dengan keterandalan pelaporan keuangan daerah, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃: Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah

Model Penelitian

Model Penelitian dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variable-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistic. Berdasarkan karakteristik masalahnya penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif (*causal-comparative research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat serta pengaruh antara dua variabel atau lebih. Pembahasan mengacu pada hasil estimasi dari data-data yang diperoleh, yang kemudian dipaparkan secara sistematis dan faktual. Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah sebagai variabel independen terhadap keterandalan pelaporan keuangan sebagai variabel dependen. Populasi dari penelitian ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini mengambil populasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Provinsi Jawa Timur, jumlah SKPD Provinsi Jawa Timur adalah 64 SKPD yang terdiri dari 16 Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 20 Dinas, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, 12 Lembaga Teknik/Badan/Bagian, 5 RSUD, 4 BAKORWIL, Satuan Polisi Pamong Praja dan 3 Lembaga Lain. Dalam pengambilan sampel, teknik yang digunakan adalah teknik "*purposive sampling*" yang berarti bahwa pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Berikut kriteria sampel yang telah ditentukan oleh peneliti: (1) Berdasarkan pertimbangan pejabat yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur; (2) Bekerja di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Timur lebih dari lima tahun

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek merupakan jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian. Data subjek dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran penelitian yang berisikan daftar pernyataan terstruktur yang ditujukan kepada responden. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara metode survei dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014:199).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan yang meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai dari manusia untuk menyelesaikan tugas ataupun tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Terdapat 4 indikator yang mempengaruhi kapasitas sumber daya manusia yaitu: (1) Latar belakang pendidikan pada sub bagian keuangan/akuntansi; (2) Peran dan tanggung jawab sub bagian keuangan; (3) Pelatihan keahlian dalam tugas; (4) Sumber daya manusia yang berpengalaman.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*intenet, intranet*), *electronic*

commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Terdapat 5 indikator yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi yaitu: (1) Penggunaan secara optimal dari komputer dan perangkat lunak; (2) Aplikasi *software* yang digunakan; (3) Proses akuntansi secara komputerisasi; (4) Laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi; (5) Perawatan perangkat yang digunakan.

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat 4 indikator yang mempengaruhi pengawasan keuangan yaitu: (1) Pengawasan dilakukan secara efektif dan efisien; (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; (3) Pencatatan transaksi diklasifikasikan dengan benar; (4) Terdapat sistem pengawasan terhadap setiap pelaksanaan tugas.

Keterandalan yang merupakan variabel dependen adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Terdapat 5 indikator yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan yaitu: (1) Adanya transaksi keuangan yang jujur dan wajar; (2) Adanya laporan keuangan pokok sesuai aturan; (3) Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji; (4) Adanya rekonsiliasi yang dilakukan secara periodik; (5) Informasi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan umum.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis yang dimana perhitungannya menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) yang bertujuan untuk menentukan pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen atau pernyataan yang ada di kuesioner. Suatu instrumen atau pernyataan yang valid mempunyai validitas yang tinggi. Pengujian validitas menggunakan ketentuan jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikan 5% maka pertanyaan kuesioner tersebut dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana jawaban dari kuesioner tersebut memiliki kesamaan atau konsistensi yang digunakan pada waktu yang berbeda. Pengukuran reliabilitas penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *cronbach's alpha*. Menurut Ghozali (2005:42) menyatakan bahwa jika nilai koefisien *alpha* lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa konstruk atau variabel penelitian tersebut dapat dikatakan handal dan reliabel.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Tes statistik regresi berganda dengan menggunakan model sebagai berikut :

$$KP = \alpha + \beta_1 KM + \beta_2 TI + \beta_3 PK + \varepsilon$$

Keterangan :

KP	: Keterandalan Pelaporan Keuangan
α	: Konstanta
KM	: Kapasitas Sumber Daya Manusia
TI	: Pemanfaatan Teknologi Informasi
PK	: Pengawasan Keuangan
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi
ε	: <i>Error</i>

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen, variabel dependen atau keduanya terdistribusi (sebarannya) normal atau tidak normal Ghozali (2005: 147). Data dikatakan baik apabila mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan uji statistik menggunakan *non-parametrik kolmogorov-smirnov (1-sample K-S)*. Jika hasil *kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal.

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas atau independen dalam model regresi (Ghozali, 2005: 41). Jika terjadi korelasi, berarti terjadi masalah multikolinieritas. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas, penelitian ini menggunakan teknik *Variance Inflation Factor (VIF)* dan nilai *tolerance*

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi tidak memiliki varians yang konstan dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain konstan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara *studentized residual (SRESID)* dan *standardized predicted value (ZPRED)*, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual dari (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di-*standardized*.

Pengujian Model

Sebelum pengujian hipotesis yang bertujuan untuk mengukur hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan model yang terdiri dari koefisien determinasi (R^2) dan uji kelayakan model (F)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mencari seberapa besar variasi variabel independen dapat menjelaskan secara keseluruhan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap naik turunnya variasi nilai variabel dependen. Nilai koefisien determinasi R^2 menunjukkan besarnya variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen.

Uji Kelayakan Modal (Uji Statistik F) digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) (Ghozali, 2011). Ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka secara bersama-sama seluruh variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen; (2) Jika nilai signifikansi $F \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berarti bahwa secara bersama-sama variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) (Ghozali, 2011). Ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen; (2) Jika nilai signifikansi $t \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Pengujian validitas instrumen dengan bantuan perangkat lunak SPSS, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar daripada angka kritik (r hitung $>$ r tabel) maka instrumen tersebut dikatakan valid. Pengujian kualitas data pada penelitian ini dilakukan dengan sampel uji coba sebanyak 91 orang. Angka kritik pada penelitian ini adalah $N-2=91-2=89$ dengan taraf signifikan $\alpha=5\%$, maka r tabel untuk angka kritik dalam penelitian ini adalah 0,2061. Berikut ini adalah uji validitas dengan program SPSS versi 23 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	r hitung	r tabel ($\alpha=5\%$)	Keterangan
Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah	KP1	0,537	0,2061	Valid
	KP2	0,551	0,2061	Valid
	KP3	0,415	0,2061	Valid
	KP4	0,474	0,2061	Valid
	KP5	0,684	0,2061	Valid
	KP6	0,467	0,2061	Valid
	KP7	0,546	0,2061	Valid
	KP8	0,562	0,2061	Valid
	KP9	0,598	0,2061	Valid
	KP10	0,401	0,2061	Valid
	KP11	0,608	0,2061	Valid
Kualitas Sumber Daya Manusia	KM1	0,299	0,2061	Valid
	KM2	0,575	0,2061	Valid
	KM3	0,747	0,2061	Valid
	KM4	0,757	0,2061	Valid
	KM5	0,776	0,2061	Valid
	KM6	0,708	0,2061	Valid
	KM7	0,527	0,2061	Valid
	KM8	0,370	0,2061	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	TI1	0,498	0,2061	Valid
	TI2	0,844	0,2061	Valid
	TI3	0,894	0,2061	Valid
	TI4	0,835	0,2061	Valid
	TI5	0,711	0,2061	Valid
	TI6	0,767	0,2061	Valid
	TI7	0,684	0,2061	Valid
Pengawasan Keuangan Daerah	PK1	0,522	0,2061	Valid
	PK2	0,505	0,2061	Valid
	PK3	0,586	0,2061	Valid
	PK4	0,641	0,2061	Valid
	PK5	0,488	0,2061	Valid
	PK6	0,424	0,2061	Valid

Sumber: Kuesioner (diolah), 2019

Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan item pernyataan dari masing-masing variabel dapat dikatakan valid, karena mempunyai nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > 0,2061$).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana jawaban dari kuesioner tersebut memiliki kesamaan atau konsistensi yang digunakan pada waktu yang berbeda. Berdasarkan hasil uji reliabilitas nilai *cronbach's alpha* dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha (a)	Koefisien alpha	Keterangan
Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah	0,744	0,60	Reliabel
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,751	0,60	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,874	0,60	Reliabel
Pengawasan Keuangan Daerah	0,609	0,60	Reliabel

Sumber: Kuesioner (diolah), 2019

Berdasarkan Tabel 2 diatas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *cronbach's alpha* yang terdapat pada tabel diatas yaitu keterandalan pelaporan keuangan daerah 0,744, kualitas sumber daya manusia sebesar 0,751, pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,874 dan pengawasan keuangan daerah sebesar 0,609. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini pengukuran data sudah dapat dipercaya (*reliable*).

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu mengenai kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah provinsi jawa timur. Data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang telah di isi oleh responden diolah dengan menggunakan SPSS versi 23.0. Hasil perhitungan regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-.269	4.009		-.067	.947
KM	.411	.096		4.302	.000
TI	.462	.062		7.396	.000
PK	.493	.101		4.875	.000

a. Dependent Variable: KP

Sumber: Kuesioner (diolah), 2019

Berdasarkan Tabel 3, maka penjelasan keterandalan pelaporan keuangan daerah dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$KP = -0,269 + 0,411KM + 0,462TI + 0,493PK + e$$

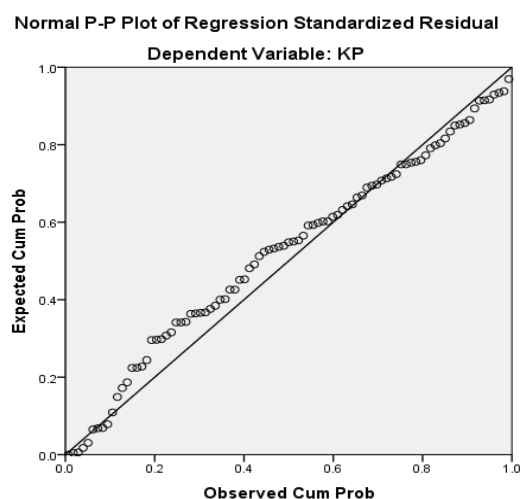
Persamaan regresi yang didapat menunjukkan variabel kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan memiliki koefisien yang bertanda positif. Penjelasan untuk persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut: (1) Nilai koefisien KM sebesar 0,472, karena koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara variabel KM dengan variabel KP. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa jika kualitas sumber daya manusia semakin baik, maka akan meningkatkan keterandalan

pelaporan keuangan daerah. Begitu pula sebaliknya jika kapasitas sumber daya manusia semakin buruk, maka akan menurunkan keterandalan pelaporan keuangan daerah; (2) Nilai koefisien TI sebesar 0,527, karena koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara variabel TI dengan variabel KP. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa jika pemanfaatan teknologi informasi semakin baik, maka akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan daerah. Begitu pula sebaliknya jika pemanfaatan teknologi informasi semakin buruk, maka akan menurunkan keterandalan pelaporan keuangan daerah; (3) Nilai koefisien PK sebesar 0,537, karena koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara variabel PK dengan variabel KP. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa jika pengawasan keuangan daerah semakin baik, maka akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan daerah. Begitu pula sebaliknya jika pengawasan keuangan daerah semakin buruk, maka akan menurunkan keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi antara variable *dependen* (terikat) dan variable *independen* (bebas) keduanya memiliki distribusi normal atau tidak yang dapat dilihat dengan menggunakan Normal P-P Plot dan Diagram Histogram yang tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Data dalam keadaan normal apabila distribusi data menyebar disekitar garis diagonal. Uji normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data yang mengikuti garis diagonal seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Sumber: Kuesioner (diolah), 2019

Gambar 2
Uji Normalitas

Berdasarkan pada gambar 2 *Normal P- P Plot Regression Standardized* di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berikut ini merupakan hasil pengujian multikolinearitas:

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
KM	,900	1,111
TI	,893	1,119
PK	,860	1,163

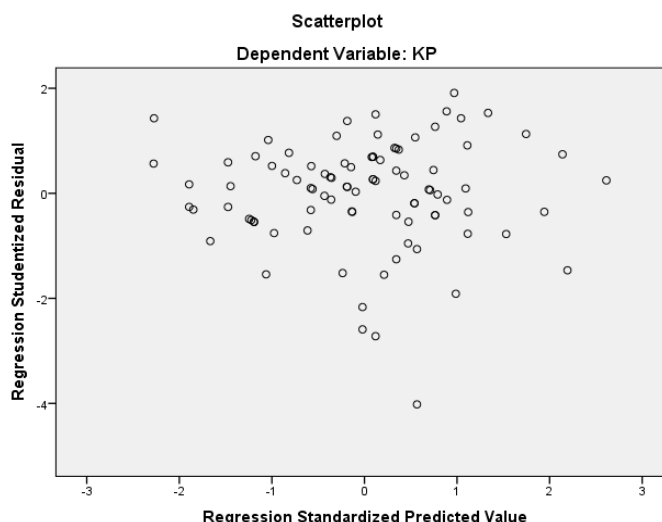
a. Dependent Variable: KP

Sumber: Kuesioner (diolah), 2019

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui nilai *tolerance* (TOL) menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai TOL > 0,10 dan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinieritas antar variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi perbedaan varian residual dari suatu periode pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat gambar hasil SPSS berikut ini:



Sumber: Kuesioner (diolah), 2019

Gambar 3

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 3 diatas dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian Model

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan α sebesar 5%. Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai F yang terlihat pada ANOVA tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	519,556	3	173,185	29,643	,000 ^b
	Residual	508,290	87	5,842		
	Total	1027,846	90			

a. Dependent Variable: KP

b. Predictors: (Constant), KM, TI, PK

Sumber: Kuesioner (diolah), 2019

Berdasarkan pada Tabel 5 maka dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung sebesar 29,643 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$), maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dihasilkan baik dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dari uji determinasi dihasilkan nilai R² sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,711 ^a	,505	,488	2,417

a. Predictors: (Constant), KM, TI, PK

b. Dependent Variable: KP

Sumber: Kuesioner (diolah), 2019

Berdasarkan pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *Adjusted R Square* pada penelitian ini sebesar 0,488 atau 48,80%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawandaerahmenjelaskan variabel keterandalan pelaporan keuangan daerah adalah sebesar 48,80% sedangkan sisanya 51,20% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model.

Uji Hipotesis

Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui variabel bebas secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Hal tersebut mengidentifikasi apakah masing-masing variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan SPSS 23 didapat hasil uji t seperti yang tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients			Sig.
		B	Std. Error	t	
1	(Constant)	1.463	5.107	.287	.775
	KM	.472	.108	4.364	.000
	TI	.527	.093	5.646	.000
	PK	.537	.137	3.914	.000

a. Dependent Variable: KP

Sumber: Kuesioner (diolah), 2019

Berdasarkan pada Tabel 7 menunjukkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut: (1) Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan hipotesis pertama (H_1) diterima; (2) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan hipotesis kedua (H_2) diterima; (3) Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan pada tabel 7 hasil penelitian menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Roshanti *et al.*, (2014), yang mengemukakan ada hubungan positif dan signifikan antara kualitas sumber daya manusia dengan keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin memadai kualitas sumber daya manusia maka pemerintah daerah juga akan semakin baik dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang andal. Dengan kualitas sumber daya manusia yang dalam hal ini kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya akan lebih efektif dan efisien.

Senada dengan hal tersebut Kesuma, *et al.*, (2014) mengungkapkan bahwa Sumber daya manusia yang tepatlah yang akan menjadi aset berharga dalam organisasi. Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keterandalan. Dengan kata lain, laporan keuangan yang baik dan tepat waktu membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengerjaannya. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan pada tabel 7 hasil penelitian menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Roshanti *et al.*, (2014), mengemukakan ada hubungan positif dan signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya pemanfaatan teknologi informasi maka akan meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dalam pelaporan keuangan yang menjadi lebih andal.

Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud seperti penggunaan komputer dan perangkat lunak secara optimal, akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan perhitungannya juga akan memiliki tingkat keakurasian yang tinggi sehingga akan berujung pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang lebih andal karena pemanfaatan teknologi akan mengurangi kesalahan yang bersifat material. Dalam hal ini komputer merupakan bagian terpenting dari teknologi informasi akan sangat membantu peningkatan kualitas dari informasi.

Perubahan dalam pola penyusunan laporan keuangan daerah yang awalnya secara manual dilihat tidak efektif, efisien dan untuk nilai keandalan suatu laporan keuangan masih kurang keakuratannya karena penyusunan laporan keuangan secara manual lebih besar resiko terjadi kesalahan, oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan daerah sangatlah dibutuhkan, teknologi informasi yang salah satu contohnya komputer dapat membantu mempercepat pekerjaan yang sedang dikerjakan, dengan menggunakan komputer akan lebih akurat dan konsisten dalam melakukan perhitungan.

Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan pada tabel 15 bahwa hasil penelitian menemukan bahwa pengawasan keuangan daerah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2014), mengemukakan ada hubungan positif dan signifikan antara pengawasan keuangan daerah dengan keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengawasan keuangan yang ada maka laporan keuangan juga akan semakin andal. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Pengawasan keuangan daerah dapat membantu pemerintah dalam mengontrol kegiatan-kegiatan OPD dalam menggunakan anggaran dan menyusun laporan keuangan. Pengawasan keuangan ini sangat penting apalagi dalam lingkup pemerintahan, agar tidak terjadi hal-hal atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum pemerintahan itu sendiri. Kurangnya pengawasan yang dilakukan akan menyebabkan kelalaian dalam pembuatan pelaporan keuangan daerah, sehingga kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tidak tepat waktu (Andry, 2013).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan melalui beberapa uji yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Pengujian pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah; (2) Pengujian pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah; (3) Pengujian pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan peneliti antara lain: (1) Kepada pihak terkait dalam hubungannya dengan peningkatan keterandalan pelaporan keuangan daerah, disarankan untuk melakukan peningkatan dalam hal kualitas sumber daya yang berkompeten, penggunaan teknologi informasi berupa komputer pada semua bagian dan pengawasan keuangan yang lebih baik lagi; (2) Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan wawancara untuk meningkatkan

pemahaman terhadap jawaban responden; (3) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan daerah misalnya transparansi dan pengendalian intern.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. T. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Di Kabupaten Sidoarjo). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Bohari. 1992. *Pengawasan Keuangan Daerah*. Rajawali Pers. Jakarta
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Edisi Ketiga. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harifan, H. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Padang. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Indriasari, D. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *Tesis*. Program S2 Ilmu Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Kesuma, I., Nadirsyah, dan Darwanis. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Auditor dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)*. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*. Vol 3, No. 1: 73- 82.
- _____. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Andi. Yogyakarta.
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.
- _____. Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Roshanti, A., E. Sujana dan K. Sinarwati .(2014). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal 2(1)*. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.